



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 3 April 2019/Periodik - 2018)

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG
UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI MAKASSAR
SUB UNIT KERJA : PENGADILAN NEGERI MAKASSAR

I. DATA PRIBADI

1. Nama : IMAM SUPRIYADI
2. Jabatan : HAKIM
3. NHK : 85062

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 4.875.000.000**

1. Tanah Seluas 200 m2 di SEMARANG , HASIL SENDIRI Rp. 75.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 270 m2/72 m2 di KOTA SEMARANG , HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 350 m2/358 m2 di KOTA SEMARANG , HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 123 m2/123 m2 di KOTA SEMARANG , HASIL SENDIRI Rp. 650.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 210 m2/150 m2 di KOTA PONTIANAK , HASIL SENDIRI Rp. 450.000.000
6. Tanah Seluas 1675 m2 di GROBOGAN, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 200.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 262.700.000**

1. MOBIL, TOYOTA AVANZA Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 160.000.000
2. MOTOR, HONDA SOLO Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 12.000.000
3. MOBIL, SUZUKI MINIBUS Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 90.000.000
4. LAINNYA, POLIGON SEPEDA Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 700.000



C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	92.172.500
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	211.000.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	5.440.872.500
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	5.440.872.500

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **30 Juli 2019**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.